

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tahun 2024



## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tahun 2024

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-01 pelaksanaan Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 03 Februari 2025  
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKALAN



ANANG YULIANTO HARI PURNOMO, AP.,MM.  
NIP. 197607141994121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut SATUAN POLISI PAMONG PRAJA diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas: membantu tugas Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

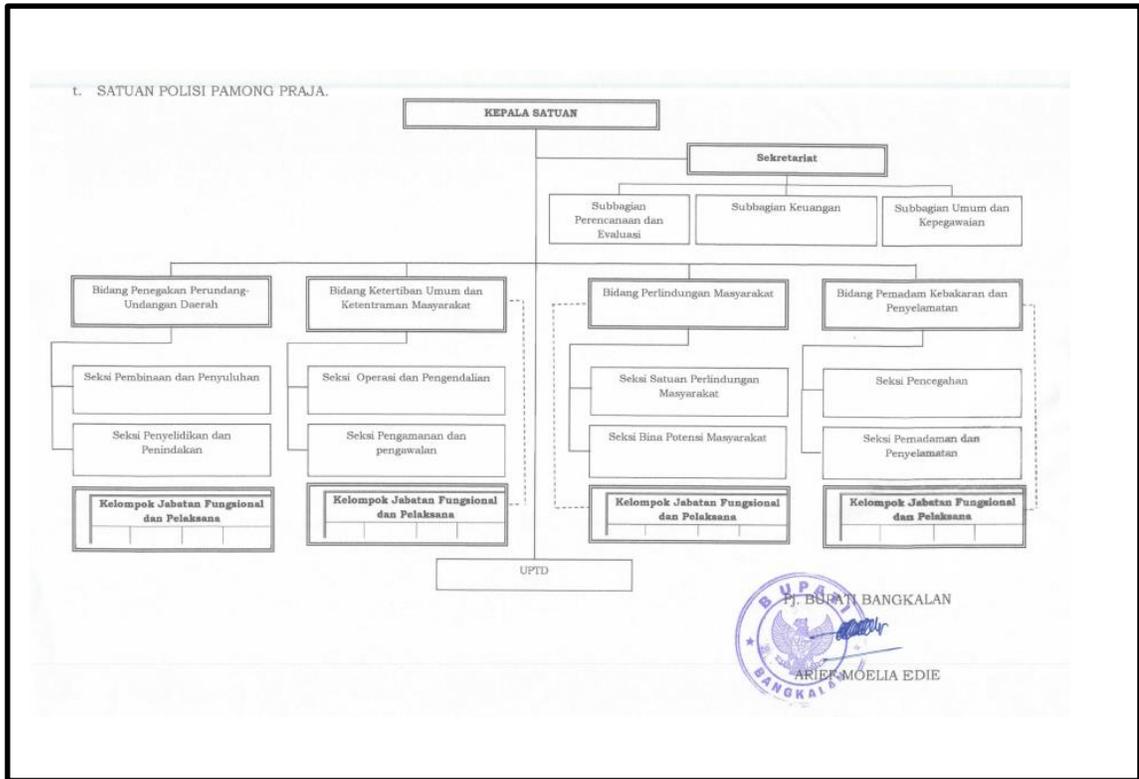
- perumusan kebijakan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Satuan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

Gambar 1.1.

### Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



## B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Menjamurnya pedagang kaki lima ditempat terlarang
2. Pemanfaatan lahan milik pemerintah kabupaten yang dikelola oleh pihak lain
3. Terbatasnya sarana dan prasarana di lapangan serta masih kurang memadai kendaraan operasional di Satuan Polisi Pamong Praja
4. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal
5. Kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Perda dan Perkada masih rendah
6. Pelayanan Pemadaman Kebakaran Kurang Maksimal
7. Hanya memiliki satu pos untuk melayani 18 kecamatan dalam wilayah manajemen kebakaran
8. Peralatan yang belum lengkap guna menunjang tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Belum maksimal dalam pencapaian SPM khususnya pencapaian respon time
10. Belum maksimalnya informasi tentang pentingnya fungsi dan keberadaan Satlinmas Desa

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan terhadap pedagang kaki lima untuk berpindah tempat
2. Beberapa tempat sudah ada yang dibersihkan
3. Tetap memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja
4. Selalu menghimbau dan memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja
5. Selalu menghimbau dan melakukan patroli
6. Selalu memberikan pelayanan Pemadaman Kebakaran dengan Maksimal untuk masyarakat

7. Tetap memanfaatkan 1 pos untuk melayani 18 kecamatan dalam wilayah manajemen kebakaran
8. Selalu memberikan pelayanan maksimal untuk Masyarakat walaupun Peralatan yang belum lengkap
9. Selalu berusaha maksimal dalam pencapaian SPM khususnya pencapaian respon time
10. Melakukan kegiatan edukasi dengan Satlinmas Desa

### **C. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

#### E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV	PENUTUP
--------	---------

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA merupakan hasil kesepakatan bersama antara SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Guna mewujudkan tujuan daerah yang ke-4 dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan yaitu “Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian Masyarakat
2. Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	7,95%	8,02%	8,72%
		Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan	90%	95%	100%

	edukasi dan pengendalian masyarakat	masyarakat yang dapat diselesaikan			
	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	67%	70%
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,85	61,25	61,85
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	86,00	87,00

Sumber : Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2024-2026

## 1. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	Persentase	Jumlah penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu - Jumlah Pelanggaran Tahun Ini/ Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu x 100%	Bidang Trantibum
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang ditangani / Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk x 100%	Bidang Trantibum, Bidang PerUU, Bidang Linmas
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	Persentase	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	Jumlah Kebakaran yang memenuhi Respon Time/ Jumlah Total Kebakaran x 100%	Bidang Pemadam Kebakaran

1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	Nilai	Nilai SAKIP PD	Nilai Komulatif dari 4 (empat) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Laporan Hasil Evaluasi AKIP (Inspektorat)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Perhitungan terhadap survey yang dilakukan kepada penerima pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretariat

Sumber : Indikator Kinerja Utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	Persentase	7,95%
		Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	90%
		Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	Persentase	64%
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta	Nilai SAKIP PD	Nilai	60,85

		perlindungan masyarakat			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,25

Sumber : Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2024

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 04 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	90%

2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,85
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25

Sumber : Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA :

**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum	100	%
1.1	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	100	%
1.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	16	kasus

1.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	kasus
1.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	dokumen
1.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	dokumen
1.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	orang
1.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3	dokumen
1.1.7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	laporan
1.2	<b>KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA</b>	<b>Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
1.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	25	laporan

1.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3	laporan
2	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase pelayanan penanggulangan bencana</b>	100	%
2.1	<b>KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</b>	100	%
2.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150	orang
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase kejadian kebakaran yang ditangani</b>	100	%
3.1	<b>KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran</b>	100	%
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10	dokumen
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	laporan
3.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	dokumen

3.1.4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8	unit
3.1.5	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	30	orang
3.2	<b>KEGIATAN INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
3.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	dokumen
3.2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	dokumen
3.3	<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	150	orang

3.4	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASI Pencarian dan PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan</b>	100	%
3.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	8	unit
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	%
4.1	<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan</b>	100	%
4.1.1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen
4.1.3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen
4.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen
4.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen

4.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan
4.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan
<b>4.2</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	orang/bulan
4.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan
4.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	laporan
<b>4.3</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
4.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen
4.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	laporan
<b>4.4</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
4.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	340	paket
<b>4.5</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>

4.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket
4.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket
4.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	paket
4.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket
4.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	dokumen
4.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan
4.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	laporan
4.6	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
4.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan
4.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan
4.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan
4.7	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
4.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit

4.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	unit
4.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6	unit
4.7.4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15	unit

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja

Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	7,95%	7,95%	100,00%	Sangat Tinggi	Bidang Trantibum
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	98%	108,89%	Sangat Tinggi	Bidang Trantibum, Bidang PerUU, Bidang Linmas
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	64%	100,00%	Sangat Tinggi	Bidang Pemadam Kebakaran
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,85	60,3	99,10%	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi AKIP (Inspektorat)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	88	103,23%	Sangat Tinggi	Sekretariat

Uraian penjelasan tabel:

1. Target pada indicator Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada adalah sebesar 7,95% dengan realisasi 7,95% sehingga capaiannya sebesar 100%
2. Target pada indicator Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan adalah sebesar 90% dengan realisasi 98% sehingga capaiannya sebesar 108,89%
3. Target pada indicator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time adalah sebesar 64% dengan realisasi 64% sehingga capaiannya sebesar 100%
4. Target pada indicator :
  - a. Nilai SAKIP PD adalah sebesar 60,85 dengan realisasi 60,3 sehingga capaiannya sebesar 99,10%

- b. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 85,25 dengan realisasi 88,00 sehingga capaiannya sebesar 103,23%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	-	-	4,35%	7,95%	7,95%	100,00%
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	-	-	99%	90%	98%	108,89%
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	-	-	68%	64%	64%	100,00%
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	-	-	60,39	60,85	60,3	99,10%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	85,14	85,25	88	103,23%

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator kinerja Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada pada tahun 2023 terealisasi 4,35%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terealisasi sebesar 7,95% maka ada peningkatan.
2. Indikator kinerja Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan pada tahun 2023

teralisasi 99%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 teralisasi sebesar 98% maka ada penurunan.

3. Indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time pada tahun 2023 teralisasi sebesar 68%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 teralisasi sebesar 64% maka ada penurunan.
4. Indikator Nilai SAKIP PD pada tahun 2023 teralisasi sebesar 30,39. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 teralisasi 60,30 maka ada penurunan.
5. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 teralisasi sebesar 85,14. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 teralisasi sebesar 88,00 maka ada peningkatan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR 2024	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/5*100)
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	7,95%	7,95%	100,00%
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	98%	90%	108,89%
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	64%	100,00%

1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,3	60,85	99,10%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88	85,25	103,23%

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator kinerja Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada pada tahun 2024 terealisasi sebesar 7,95%. Jika dibandingkan dengan target akhir perubahan renstra sebesar 7,95%, maka Tingkat kemajuan kinerja mencapai 100%
2. Indikator kinerja Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98%. Jika dibandingkan dengan target akhir perubahan renstra sebesar 90%, maka Tingkat kemajuan kinerja mencapai 108,89%
3. Indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time pada tahun 2024 terealisasi sebesar 64%. Jika dibandingkan dengan target akhir perubahan renstra sebesar 64%, maka Tingkat kemajuan kinerja mencapai 100%
4. Indikator kinerja Nilai SAKIP PD pada tahun 2024 terealisasi sebesar 60,30. Jika dibandingkan dengan target akhir perubahan renstra sebesar 60,85, maka Tingkat kemajuan kinerja mencapai 99,10%
5. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 terealisasi sebesar 88,00. Jika dibandingkan dengan target akhir perubahan renstra sebesar 85,25, maka Tingkat kemajuan kinerja mencapai 103,23%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/  
Kabupaten/Kota lain**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/5*100)
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	7,95%	-	-
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	98%	-	-
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	-	-
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,3	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	7,95%	7,95%	100,00%	Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat dengan menurunnya pelanggaran	

						PERDA/PERKADA melalui sosialisasi dengan Masyarakat	
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	98%	108,89%	Aparatur Satpol PP yang loyal terhadap Institusi Pemerintah Bangkalan dengan melakukan patroli wilayah bangkalan dan dengan pendekatan yang humanis dengan masyarakat	
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	64%	100,00%	Aparatur Pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selalu siap siaga demi masyarakat	
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,85	60,3	99,10%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	88	103,23%		

Uraian penjelasan tabel:

1. Analisis keberhasilan/kegagalan : Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat dengan menurunnya pelanggaran PERDA/PERKADA melalui sosialisasi dengan Masyarakat  
Solusi yang dilakukan : mempertahankan kinerja aparaturnya Satpol PP, Linmas dan Damkar, dan memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan.
2. Analisis keberhasilan/kegagalan : Aparatur Satpol PP yang loyal terhadap Institusi Pemerintah Bangkalan dengan melakukan patroli wilayah bangkalan dan dengan pendekatan yang humanis dengan Masyarakat

Solusi yang dilakukan : mempertahankan kinerja aparaturnya Satpol PP, Linmas dan Damkar, dan memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan.

- Analisis keberhasilan/kegagalan : Aparatur Pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selalu siap siaga demi masyarakat

Solusi yang dilakukan : mempertahankan kinerja aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan.

- Analisis keberhasilan/kegagalan : Ada beberapa permintaan yang belum bisa tercover sehingga nilainya turun.

Solusi yang dilakukan : memenuhi permintaan seoptimal mungkin sehingga nilai mampu dipertahankan atau bisa ditingkatkan.

- Analisis keberhasilan/kegagalan : Tingkat kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan adalah sangat tinggi dalam menilai kinerja PD

Solusi yang dilakukan : meningkatkan lagi pelayanan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja atau minimal mempertahankan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG</b>
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	100,00 %				

1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	108,89 %				
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)</b>	<b>108,89 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100,00 %	Menunjang
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100,00 %	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100,00 %	Menunjang

				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00 %	Menunja ng
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100,00 %	Menunja ng
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100,00 %	Menunja ng
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100,00 %	Menunja ng
				<b>KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA</b>	<b>Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunja ng</b>
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelom pok Masyarakat/Pelaku Usaha/	100,00 %	Menunja ng
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,00 %	Menunja ng
				<b>PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA</b>	<b>Persentase pelayanan penanggulangan bencana</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunja ng</b>

				<b>KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100,00 %	Menunjang
1. 2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	100,00 %				
				<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase kejadian kebakaran yang ditangani</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	100,00 %	Menunjang
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	Menunjang

				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100,00 %	Menunjang
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100,00 %	Menunjang
				Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100,00 %	Menunjang
				<b>KEGIATAN INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100,00 %	Menunjang
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100,00 %	Menunjang
				<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>

				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100,00 %	Menunjang
				<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	100,00 %	Menunjang
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	99,10 %				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	103,23 %				
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00 %	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100,00 %	Menunjang

					Dokumen RKA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00 %	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00 %	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00 %	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00 %	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	Menunjang
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00 %	Menunjang

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00 %	Menunjang
				<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir</b>	100,00 %	<b>Menunjang</b>
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,00 %	Menunjang
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00 %	Menunjang
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00 %	Menunjang
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00 %	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00 %	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00 %	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100,00 %	Menunjang

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00 %	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00 %	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00 %	Menunjang
				<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00 %	Menunjang
				<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00 %	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100,00 %	Menunjang

			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100,00 %	Menunjang
--	--	--	---------------------------------	--	----------	-----------

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

## B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.997.414.900	1.597.681.950	80%
1.1	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA	1.486.477.000	1.264.473.450	85%
1.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	2.500.000	2.500.000	100%
1.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.500.000	1.440.000	96%
1.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	850.000	0	0%
1.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	661.420.000	661.419.850	100%
1.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.050.000	2.050.000	100%

1.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	815.657.000	594.613.600	73%
1.1.7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	2.500.000	2.450.000	98%
1.2	<b>KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PERATURAN BUPATI/ WALI KOTA</b>	<b>510.937.900</b>	<b>333.208.500</b>	<b>65%</b>
1.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	509.437.900	331.715.400	65%
1.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.500.000	1.493.100	100%
2	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>100.000.000</b>	<b>92.444.500</b>	<b>92%</b>
2.1	<b>KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>100.000.000</b>	<b>92.444.500</b>	<b>92%</b>
2.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	92.444.500	92%
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>300.000.000</b>	<b>291.720.737</b>	<b>97%</b>
3.1	<b>KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>139.302.000</b>	<b>132.608.443</b>	<b>95%</b>
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.263.232	68.547.675	98%
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.200.000	41.600.000	92%
3.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	14.300.000	14.250.000	100%
3.1.4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	6.520.768	6.520.768	100%
3.1.5	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	3.018.000	1.690.000	56%
3.2	<b>KEGIATAN INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>100%</b>
3.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.310.000	1.310.000	100%
3.2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	680.000	680.000	100%

3.3	<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>	150.000.000	149.951.694	100%
3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	150.000.000	149.951.694	100%
3.4	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA</b>	8.708.000	7.170.600	82%
3.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	8.708.000	7.170.600	82%
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	13.293.550.017	12.629.489.549	95%
4.1	<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	10.026.900	8.627.500	86%
4.1.1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.191.550	3.176.500	100%
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	121.550	120.500	99%
4.1.3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	116.050	115.000	99%
4.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	517.500	517.500	100%
4.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	477.000	0	0%
4.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.803.250	3.348.000	88%
4.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	1.350.000	75%
4.2	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	7.806.428.959	7.155.123.030	92%
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.803.238.809	7.151.957.880	92%
4.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	690.050	665.050	96%
4.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.100	2.500.100	100%
4.3	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	1.430.100	1.430.100	100%
4.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	615.050	615.050	100%
4.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	815.050	815.050	100%

<b>4.4</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>93.355.000</b>	<b>92.575.000</b>	<b>99%</b>
4.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	93.355.000	92.575.000	99%
<b>4.5</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>32.654.608</b>	<b>31.959.850</b>	<b>98%</b>
4.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	797.000	797.000	100%
4.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.705.450	13.395.350	98%
4.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.250.000	5.250.000	100%
4.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.462.158	2.187.500	89%
4.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	
4.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.760.000	2.760.000	100%
4.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.680.000	7.570.000	99%
<b>4.6</b>	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>5.196.235.800</b>	<b>5.189.261.519</b>	<b>100%</b>
4.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	905.800	905.800	100%
4.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	51.728.047	96%
4.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.141.330.000	5.136.627.672	100%
<b>4.7</b>	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>153.418.650</b>	<b>150.512.550</b>	<b>98%</b>
4.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.604.400	21.354.500	94%
4.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.144.250	123.488.050	99%
4.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4.470.000	4.470.000	100%
4.7.4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.200.000	1.200.000	100%

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**

## Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
					(RP)	(RP)		
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	7,95%	7,95%	100,00%	15.690.964.917	14.611.336.736	93%	7%
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	90%	98%	108,89%	2.097.414.900	1.690.126.450	81%	19%
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	64%	64%	100,00%	300.000.000	291.720.737	97%	3%
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	60,85	60,3	99,10%	13.293.550.017	12.629.489.549	95%	5%
		85,25	88	103,23%				

Uraian penjelasan tabel:

1. Tujuan Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat dengan indicator Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada, capaian kinerjanya adalah 100%, capaian anggarannya sebesar 93%.
2. Sasaran Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian Masyarakat dengan indicator Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan, capaian kinerjanya adalah 108,89%, capaian anggarannya sebesar 81%.
3. Sasaran Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time dengan indicator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time, capaian kinerjanya adalah 100%, capaian anggarannya sebesar 97%.

4. Sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat dengan indicator:
  - a. Nilai SAKIP PD , capaian kinerjanya adalah 99,10%, capaian anggarannya sebesar 95%.
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian kinerjanya adalah 103,23%, capaian anggarannya sebesar 95%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 1 Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan

masyarakat yang dapat diselesaikan dengan capaian kinerja sebesar 108,89% (kategori sangat tinggi)

- Sasaran 2 Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 3 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP PD dengan capaian kinerja sebesar 99,10% (kategori sangat tinggi) dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 103,23% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 15.690.964.917 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.611.336.736 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 93% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 03 Februari 2025  
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKALAN



ANANG YULIANTO HARI PURNOMO, AP.,MM.  
NIP. 197607141994121001